

2021



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

**Pemerintah Kabupaten Tapin**  
**Dinas Perikanan Tahun 2021**

Jl. Jend. Sudirman Km. 2,5 Rantau 71111  
Telp / Fax. (0517) 31491  
Email [diskan\\_tapin@yahoo.com](mailto:diskan_tapin@yahoo.com)  
[diskan.tapin@gmail.com](mailto:diskan.tapin@gmail.com)





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

### KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tapin Tahun 2020 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja ini merupakan akhir dari serangkaian perencanaan kegiatan, penetapan indikator kinerja, pengukuran, analisa pencapaian kinerja dan evaluasi kinerja selama Tahun 2020. Laporan ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tapin selama Tahun Anggaran 2020.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhirnya laporan ini diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja tahun berikutnya.

Rantau, 2021

Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Tapin,



J. Pariana, S.AP, MM

NIP 19660512 198602 1 006





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

### LKIP TAHUN 2020

---

#### DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	10
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	20
A. Pencapaian Indikator Kinerja Utama .....	20
B. Realisasi Pencapaian Anggaran .....	43
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	47



# **PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

## **DINAS PERIKANAN**

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang bisa dan telah dicapai oleh instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Tapin sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan .

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, merupakan landasan bagi melaksanakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat termasuk pembangunan perikanan.

Arah kebijakan yang tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 adalah “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa”, setelah terbitnya Perda No.09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tanggal 03 Oktober 2016 bahwa untuk Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh SOPD Dinas Perikanan Kabupaten Tapin.

Pembangunan perikanan dilaksanakan dengan orientasi pendekatan agribisnis memanfaatkan sumberdaya perikanan secara optimal, peningkatan aktivitas ekonomi perdesaan dan terciptanya kondisi yang menjamin pembangunan. Agar pembangunan perikanan dapat dilaksanakan secara optimal diperlukan upaya agar sumberdaya manusia menjadi profesional dalam menangani/mengelola perikanan untuk menghasilkan berbagai produk unggulan yang mampu bersaing di pasar domestik dan





# **PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

## **DINAS PERIKANAN**

---

internasional sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya maupun nelayan tangkap, pengolah dan pemasar hasil perikanan serta masyarakat.

Pembangunan Perikanan pada hakekatnya merupakan serangkaian kegiatan pemanfaatan sumberdaya perikanan yang ada di wilayah kabupaten Tapin baik sumberdaya alam maupun SDM yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan dan memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang produktif serta dalam rangka memenuhi kebutuhan gizi masyarakat akan protein asal ikan agar tidak terjadi “ Los Generation “ .

Indikator kinerja sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Tapin dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Tapin. Indikator Kinerja Sasaran menggunakan indicator kinerja utama yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indicator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Tapin, Indikator keluaran (output) indicator hasil (outcome) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perikanan Kabupaten Tapin. Gambaran Pengukuran Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tapin dalam pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun, disajikan dalam diagram 1.1.

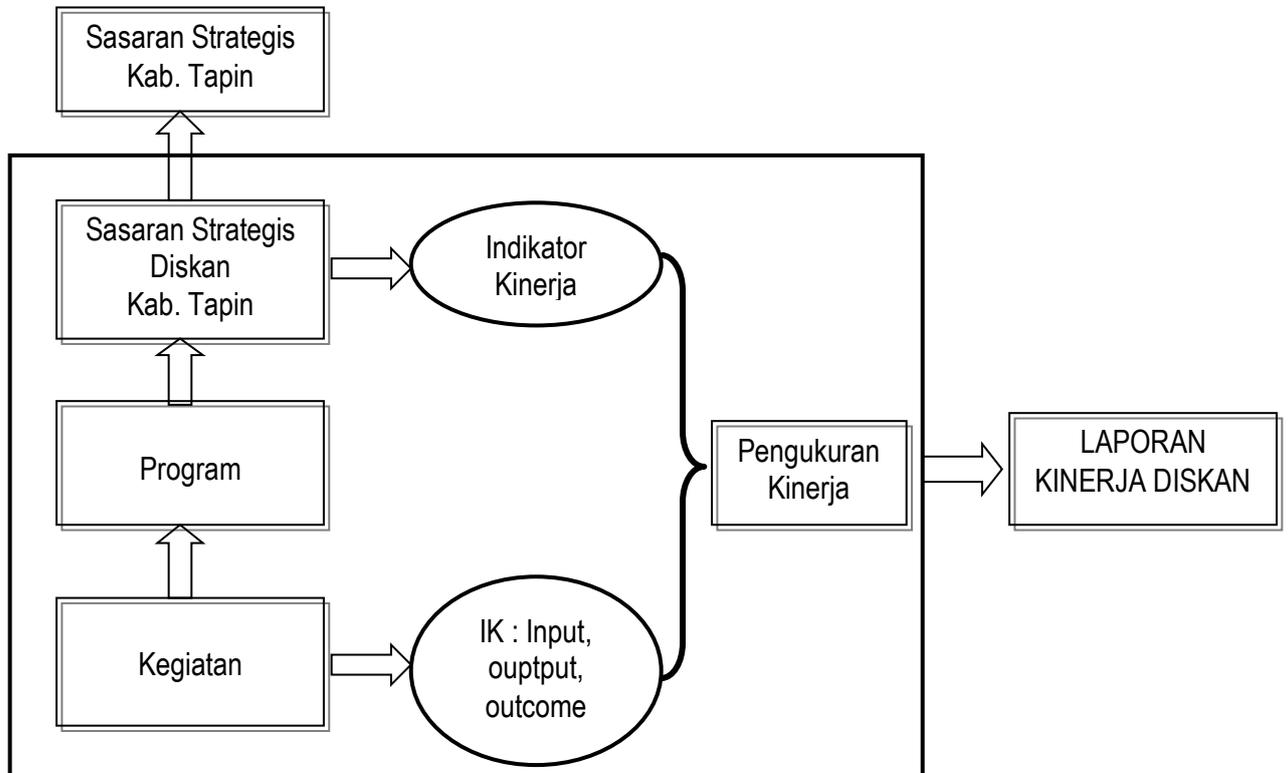




# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

Diagram 1.1. Alur Pikir Pengukuran Kinerja



Metode penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tapin secara umum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2013 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Tapin telah membentuk lembaga perangkat daerah berdasarkan pertimbangan berbagai aspek, yang meliputi : kewenangan yang dimiliki daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan





# **PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

## **DINAS PERIKANAN**

keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur dan pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor : 05 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Daerah Kabupaten Tapin. Struktur organisasi pada Dinas Perikanan Kabupaten Tapin, sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Perikanan Budidaya , terdiri atas :
  - Seksi Perbenihan Ikan
  - Seksi Pembudidayaan Ikan
  - Seksi Pakan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan
- d. Bidang Perikanan Tangkap dan Sumberdaya Ikan, terdiri atas :
  - Seksi Pemanfaatan Sumberdaya Ikan
  - Seksi Pengendalian Sumberdaya Ikan
- e. Bidang Pemberdayaan Nelayan kecil dan Usaha Perikanan pembudidaya ikan , terdiri dari :
  - Seksi Kemitraan, Pendidikan dan Pelatihan
  - Seksi Penumbuh Kembangan Kelompok
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Unit Pelaksana Teknis ; UPT BBI LOKAL LINUH
  - Kepala UPT BBI Lokal Linuh
  - Kepala Tata Usaha

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten





# **PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

## **DINAS PERIKANAN**

Tapin, disebutkan bahwa Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapin dibidang perikanan yaitu mempunyai tugas melaksanakan urusan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Perikanan Kabupaten Tapin mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan dan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis;
- e. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

Tugas pokok dari Dinas Perikanan Kabupaten Tapin di atas dipilah-pilah menjadi 5 (lima) kelompok kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bagian Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi penyusunan program dan rencana kegiatan dinas, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, dan keprotokolan, serta penyusunan laporan.
- b. Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian perbenihan ikan, perikanan budidaya .
- c. Bidang Pemberdayaan Nelayan kecil dan Usaha Perikanan pembudidaya ikan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan mengkoordinasikan usaha tani dan sumber daya, pengolahan dan mutu hasil serta promosi dan pemasaran hasil perikanan serta pemberdayaan kelompok
- d. Bidang Perikanan tangkap dan sumberdaya ikan menyelenggarakan pembinaan perikanan tangkap, pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan serta penyebaran informasi.
- e. UPTD BBI Lokal Linuh mempunyai tugas Melaksanakan pembenihan, menyediakan benih, menyediakan tempat jual beli benih ikan air tawar, meningkatkan produksi benih / induk ikan air tawar, melaksanakan percontohan pembenihan, melaksanakan uji coba teknologi pembenihan ikan air tawar, dan melaksanakan urusan tata usaha

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan maka dipandang perlu untuk meningkatkan kinerja di bidang pembangunan perikanan melalui peningkatan kompetensi aparat sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional, berhasil guna dan berdaya guna untuk melaksanakan otonomi daerah dan mewujudkan Good Governance.

Secara lengkap susunan organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tapin digambarkan dalam Diagram 1.2.

Diagram 1.2. Struktur Organisasi Dinas dan Perikanan Kabupaten Tapin

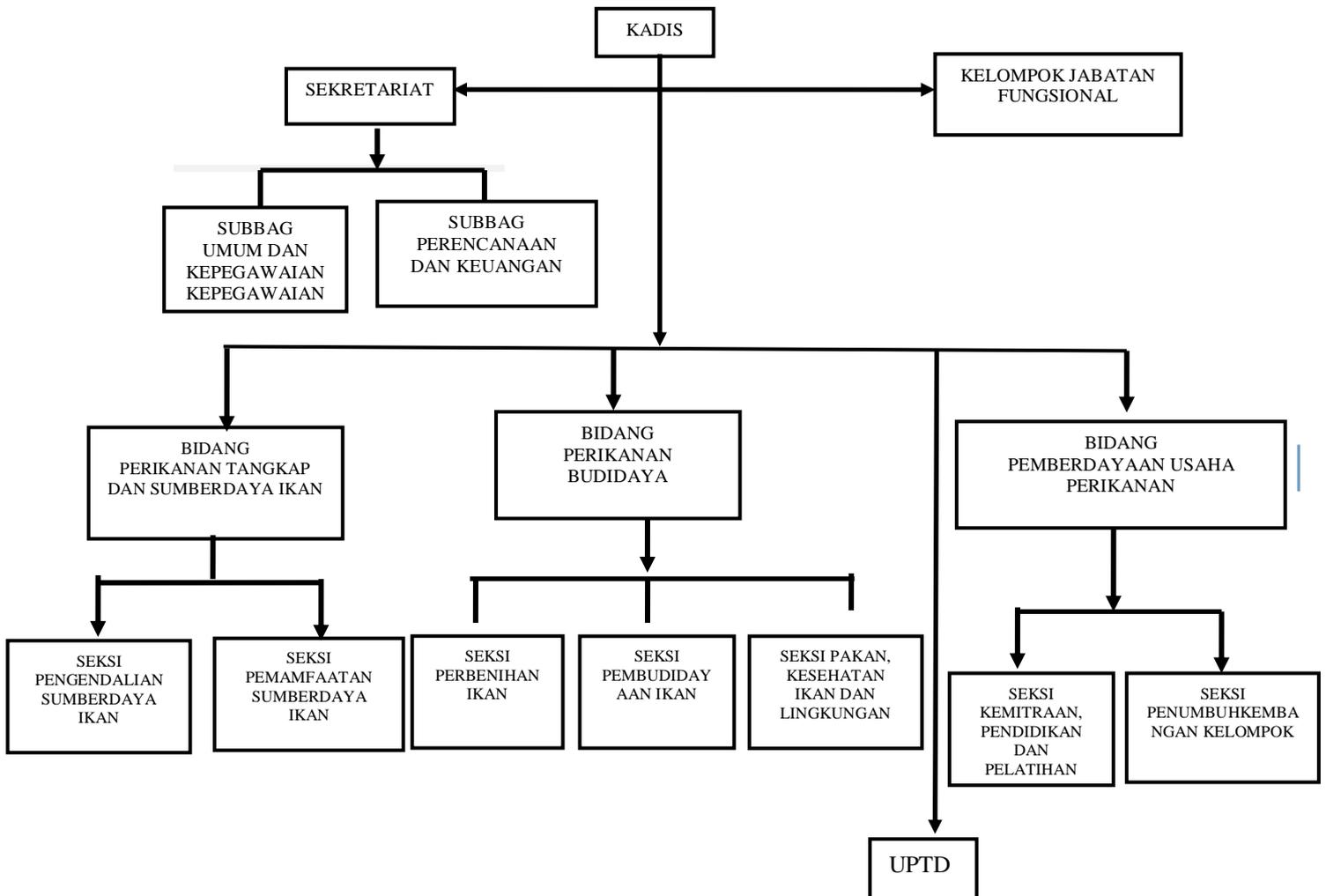




# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

DINAS PERIKANAN KAB. TAPIN (Perda No. 09 Tahun 2016)



Permasalahan utama yang perlu direspon berkaitan dengan peran dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Tapin Tahun yaitu :

- 1) Kurangnya sarana dan prasarana produksi kelompok pembudidaya ikan
- 2) Rendahnya tingkat penggunaan induk/benih ikan yang unggul oleh masyarakat
- 3) Kurangnya pembenihan ikan lokal





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

- 4) Adanya hama penyakit ikan pada usaha perikanan budidaya
- 5) Kurangnya kesehatan lingkungan kawasan perikanan budidaya
- 6) Belum optimalnya pembudidaya ikan terhadap akses pasar, teknologi dan sumber permodalan
- 7) Kurangnya pemanfaatan lahan pekarangan untuk usaha perikanan budidaya
- 8) Masih kurangnya minat masyarakat terhadap budidaya ikan karena anggapan usaha budidaya ikan masih high risk ( resiko tinggi)
- 9) Belum adanya revitalisasi terhadap kolam marjinal , keramba dan jaring apung (KJA)
- 10) Kurangnya permodalan bagi kelompok pembudidaya ikan
- 11) Penurunan populasi ikan lokal di habitat alami
- 12) Kurangnya pemahaman nelayan tentang pemanfaatan Sumber Daya Ikan (SDI)
- 13) Terbatasnya sarana dan prasarana serta personil dalam pengawasan sumberdaya perikanan di perairan umum.
- 14) Masih adanya jual beli anak ikan dan penangkapan ikan secara ilegal di perairan umum.
- 15) Terbatasnya kemampuan para pelaku usaha pengolahan ikan dalam diversifikasi hasil olahan produk perikanan.
- 16) Kurangnya sarana pengolahan hasil perikanan
- 17) Kurangnya Pengetahuan masyarakat tentang kreasi menu pangan lokal
- 18) Masih rendahnya tingkat SDM pelaku usaha Perikanan

Evaluasi SAKIP dilakukan guna mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasi SAKIP sekaligus untuk menjaga konsistensi implementasi SAKIP dan mendorong adanya peningkatan kinerja, untuk itu setiap tahun dilakukan evaluasi implementasi SAKIP pada instansi pemerintah oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Tapin. Progres nilai hasil evaluasi





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan tahun 2019 – 2020 sebagai berikut:

	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019	Nilai 2020
a.	Perencanaan Kinerja	30	22,19	28,33
b.	Pengukuran Kinerja	25	15,00	19,06
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,07	12,04
d.	Evaluasi Internal	10	6,27	6,92
e.	Capaian Kinerja	20	14,50	15,25
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>68,03</b>	<b>81,60</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>	<b>A</b>

Tabel 1.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Perikanan Tahun 2020

No	Hasil Evaluasi	Saran Tindak Lanjut
1	Pengukuran kinerja belum menggunakan teknologi informasi	Agar mengembangkan dan menggunakan teknologi informasi untuk mengukur kinerja
2	Pemantauan Rencana Aksi belum sepenuhnya dilaksanakan secara terjadwal	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan secara bulanan
3	Pemantauan Rencana Aksi belum semua memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan	Agar Rencana Aksi diberikan penilaian dan alternatif atas seluruh aksi yang dilaksanakan
4	Hasil Evaluasi Rencana Aksi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata	Agar seluruh rekomendasi hasil evaluasi rencana aksi ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

### BAB II

#### PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

#### 1. Visi dan Misi Kabupaten Tapin

Untuk melaksanakan peran strategisnya Dinas Perikanan berupaya terus memperbaiki kinerjanya. Pembangunan Perikanan merupakan rangkaian berbagai upaya mengembangkan kapasitas masyarakat perikanan agar mampu melaksanakan kegiatan ekonomi produktif secara mandiri dan selanjutnya mampu memperbaiki kehidupannya sendiri. Dalam hal ini pihak aparat berperan sebagai simulator, motivator dan fasilitator yang mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi dan sosial para pelaku usaha Perikanan, agar dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.

Demi mendukung visi yang telah di rumuskan dalam RPJMD Kabupaten Tapin Periode 2018 – 2023 yaitu Pemerintah Kabupaten Tapin ingin mewujudkan “ **BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS** ” dan misi “**Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa** “ Dinas Perikanan melakukan hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut :





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

1. Pembangunan Perikanan adalah suatu proses perubahan untuk menuju kehidupan yang lebih baik melalui pengelolaan sumberdaya perikanan di kabupaten Tapin
2. Berdaya saing ditandai dengan pemberdayaan masyarakat dan berkembangnya ekonomi rakyat sebagai pelaku agribisnis, terciptanya peluang pasar, menguatnya kelembagaan usaha tani, diterapkan IPTEK dan manajemen ekonomi modern dalam kegiatan agribisnis.
3. Berkelanjutan ditandai dengan oleh kemampuan mengembangkan usaha dan memenuhi permintaan pasar secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan kemampuan dan kelestarian sumber daya alam serta lingkungan hidup
4. Berkeadilan ditandai dengan adanya kesempatan berusaha yang seluasnya – luasnya dan keseimbangan antara kebijakan pemerintah untuk memberikan peluang terhadap usaha kecil dan menengah untuk berusaha.
5. Untuk Kesejahteraan Masyarakat mengandung pengertian bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan sepenuhnya ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat perikanan, terutama pembudidaya, nelayan, pedagang ikan, pengolah skala kecil dan menengah dan sector perikanan merupakan sumber kehidupan dan penghidupan yang layak dan prospektif sebagai usaha dalam skala bisnis.

Sesuai dengan visi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tapin Dinas Perikanan melakukan upaya agar tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat dilaksanakan dan berhasil dengan baik sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan
2. Meningkatkan Kapasitas kelembagaan dan tata laksana kerja
3. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Perikanan
4. Memelihara Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Sumber Daya Perikanan





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

---

### 2. Tujuan, Sasaran , Indikator Sasaran

#### a. Tujuan

Tujuan Dinas Perikanan demi mendukung visi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tapin pada kurun waktu sampai 5 (lima) tahun kedepan (2018-2023), yaitu **“Berkembangnya agrobisnis dan pariwisata ”**

#### b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Perikanan Kabupaten Tapin yaitu **“ Meningkatkan Produksi Perikanan”**

#### c. Indikator Sasaran

Indikator Sasaran hasil yang akan dicapai Dinas Perikanan adalah **“Persentase Peningkatan Produksi Perikanan”** baik Perikanan Budidaya Maupun Perikanan Tangkap.





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

Tabel 2.1. Indikator Sasaran Dinas Perikanan Tahun 2018 – 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target	Target Capaian Tahun										Kondisi Akhir	
			2018		Selama	2019		2020		2021		2022		2023		Ton	%
			Ton	%	5 tahun	Ton	%	Ton	%	Ton	%	Ton	%	Ton	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan																
1	Produksi perikanan budidaya	Ton	300	100	1.901	324	349,92	100	377,91	100	408,15	100	440,8	100	1.901	100	
2	Produksi perikanan tangkap	Ton	3950	100	20.229,08	3.981,60	4.013,45	100	4.045,56	100	4.077,92	100	4.110,55	100	20.229,08	100	
3	kelompok yang naik kelas	kel	13	100	39	8	7	100	8	100	8	100	8	100	39	100	





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

---

### **d. Kebijakan**

Kebijakan yang ditetapkan dalam upaya pencapaian sasaran strategis adalah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2023.

Kebijakan pembangunan perikanan diarahkan untuk Meningkatkan Produktifitas, efisiensi, nilai tambah produk dan kelembagaan kelompok usaha perikanan dalam rangka meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan, nelayan penangkap ikan dan pengolah hasil produk perikanan pada tingkat yang memadai.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan, Dinas Perikanan Kabupaten Tapin menempuh beberapa kebijakan pembangunan perikanan, antara lain adalah :

#### **a) Kebijakan Publik**

Mendorong semua aparat perikanan agar memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya pembudidaya ikan agar mereka dapat berusaha perikanan secara agribisnis, mendapatkan modal secara mudah dan murah, menerapkan teknologi tepat guna spesifikasi lokasi, meningkatkan produktivitas perikanan guna memanfaatkan peluang pasar yang masih terbuka luas

#### **b) Kebijakan Teknis**

1. Peningkatan produktifitas, efisiensi, dan nilai tambah produk
2. Pengembangan dan Pengawasan sistem jaminan mutu dan penelusuran produk hasil perikanan dan jaminan ketersediaan bahan baku industri





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

3. Konservasi dan rehabilitasi sumberdaya perikanan dan upaya adaptasi bencana dan perubahan iklim
4. Pengawasan Pemanfaatan sumberdaya perikanan
5. Pengembangan sumberdaya manusia iptek perikanan
6. Peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan ikan, Nelayan penangkap ikan dan pengolah hasil perikanan
7. Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi perikanan

Penetapan kebijakan dan program, serta pemilihan kegiatan merupakan wujud operasionalisasi dari strategi, yaitu suatu cara mengelola risiko dengan memaksimalkan segala kekuatan untuk mengisi / memanfaatkan semua peluang dalam upaya mencapai sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Tapin Tahun 2021.

Rencana Kerja Tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Tapin sebagai penjabaran tahunan dari sasaran, indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.2. Rencana Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	KETERSEDIAAN PANGAN ASAL IKAN	JUMLAH KETERSEDIAAN IKAN (TON)	8.053,57
2	MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN (TON)	4.506,57

Setiap awal tahun berjalan Pemerintah Kabupaten Tapin menyusun penetapan kinerja yang selanjutnya di tuangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Bupati Tapin dan Kepala Dinas/Badan/Bagian/Kecamatan. Demikian pula halnya dengan Dinas Perikanan Kabupaten Tapin juga menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya yang ditandatangani Kepala Dinas





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

Perikanan dan Bupati Tapin dan di tindak lanjuti dengan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas dengan Pejabat Eselon III (tiga) di bawahnya , dan selanjutnya antara pejabat eselon tiga (tiga) dengan Pejabat eselon IV (empat) di bawahnya Penetapan Kinerja merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun.

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan untuk mencapai sasaran strategis yang di tetapkan. Penetapan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tapin Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.2. Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2021

KODE	URAIAN	ANGGARAN
<b>3.01 . 3.01.01.01 . 01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>506.263.210</b>
3.01 . 3.01.01.01 . 01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	72.600.000
3.01 . 3.01.01.01 . 01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	30.905.000
3.01 . 3.01.01.01 . 01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	36.645.834
3.01 . 3.01.01.01 . 01.11	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	8.460.000
3.01 . 3.01.01.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	42.764.000
3.01 . 3.01.01.01 . 01.18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	286.018.376





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

3.01 . 3.01.01.01 . 01.19	Tapin Expo	22.170.000
3.01 . 3.01.01.01 . 01.20	Penyediaan Instalasi Listrik & Komponen Penerangan Bangunan Kantor	6.700.000
<b>3.01 . 3.01.01.01 . 02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>221.460.000</b>
3.01 . 3.01.01.01 . 02.11	Pengadaan peralatan kantor	32.770.000
3.01 . 3.01.01.01 . 02.22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	50.000.000
3.01 . 3.01.01.01 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	65.690.000
3.01 . 3.01.01.01 . 02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kantor	13.000.000
3.01 . 3.01.01.01 . 02.46	Sertifikasi Tanah Pemerintah Daerah	60.000.000
<b>3.01 . 3.01.01.01 . 06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>6.125.000</b>
3.01 . 3.01.01.01 . 06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.525.000
3.01 . 3.01.01.01 . 06.05	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	2.600.000
<b>3.01 . 3.01.01.01 . 20</b>	<b>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</b>	<b>2.832.062.100</b>
3.01 . 3.01.01.01 . 20.04	Pengembangan BBI lokal linuh	275.310.000
3.01 . 3.01.01.01 . 20.14	Pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan	612.551.100
3.01 . 3.01.01.01 . 20.34	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana BBI Lokal Linuh (DAK)	1.044.201.000





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

3.01 . 3.01.01.01 . 20.35	Pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan (DID Tahap II)	400.000.000
3.01 . 3.01.01.01 . 20.36	Pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan (DID Tahap III)	500.000.000
<b>3.01 . 3.01.01.01 . 21</b>	<b>Program pengembangan perikanan tangkap</b>	<b>181.450.000</b>
3.01 . 3.01.01.01 . 21.11	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	33.400.000
3.01 . 3.01.01.01 . 21.16	Pemanfaatan Sumberdaya Perairan	48.050.000
3.01 . 3.01.01.01 . 21.18	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (DID Tahap II)	100.000.000
<b>3.01 . 3.01.01.01 . 26</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas SDM, Kelembagaan dan Optimalisasi Produksi Perikanan</b>	<b>75.047.500</b>
3.01 . 3.01.01.01 . 26.01	Pengolahan Informasi Data Atas Hasil Produk Perikanan	36.500.000
3.01 . 3.01.01.01 . 26.02	Penanganan Pasca Produk Hasil Perikanan	23.030.000
3.01 . 3.01.01.01 . 26.03	Penumbuhkembangan Kelompok	15.517.500
<b>JUMLAH</b>		<b>3.822.407.810</b>





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

### 3. PERJANJIAN KINERJA

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Manifestasi komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dinas Perikanan Kabupaten Tapin dalam rangka pencapaian sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Ketersediaan pangan asal ikan	Jumlah ketersediaan ikan (ton)	8.053,57
2	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan (ton)	4.506,57





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

3	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase kenaikan Produksi Ikan Budidaya (TON)	324,00
4	Terlaksananya Perbenihan Ikan	Prosentasi Pembudidaya benih ikan yang mendapatkan bantuan induk ikan	-
		Jumlah Produksi Benih yang Unggul dan berkualitas (ekor)	20.000.000
5	Terlaksananya fasilitasi Sarana produksi dan sarana prasarana budidaya Perikanan	Jumlah kelompok yang di bantu sarana produksi (Kel)	6
		Jumlah kelompok pengguna Kolam Plastik (Kelompok)	3
		Luasan Areal Budidaya ikan (m2)	5.000,00
6	Tercukupinya Pakan Ikan	Jumlah Pakan Yang Diproduksi (Kg)	-
		Jumlah Pakan Yang Masuk (Ton)	486
7	Terlaksananya Pengendalian Hama Dan Penyakit Ikan	Jumlah Kasus Hama Dan Penyakit Perikanan Budidaya Yang Ditangani (kasus)	2
8	Terlaksananya uji sampel kawasan budidaya	Jumlah pemantauan lingkungan budidaya (kali)	12
9	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase kenaikan Produksi Ikan Tangkap	3.627,29
10	Terlaksananya Kegiatan Perikanan Tangkap	Jumlah penambahan kapal penangkap ikan < 3 GT (buah)	17
		Jumlah Alat tangkap (Paket)	19
11	Terlaksananya sosialisasi UU Perikanan	jlh SosialisasiUU Perikanan	3
	Terlaksananya Pemantauan Kawasan Perikanan Tangkap	Jumlah Razia / Patroli Terpadu (Kali)	13





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

		Jumlah Pemantauan, Penangkapan dan penjualan anak ikan (kali)	20
		Jumlah Sampel kawasan perikanan dengan data akurat	4
12	Meningkatkan klasifikasi kelompok Usaha Perikanan	Persentase kelompok Usaha Perikanan yang meningkat klasifikasinya (Kelompok)	8
13	Terlaksananya Kemitraan Bidang Perikanan	Jumlah Rekomendasi Yang Dikeluarkan	2
		Persentase Kelompok Bermitra Yang Dibina	0
14	Terlaksananya Diklat Usaha Perikanan	Prosentasi Kelompok yang mengikuti DIKLAT Usaha Perikanan	2
15	Terlaksananya pembinaan kelompok Usaha Perikanan	Jumlah Kelompok baru (kel)	11
		Jumlah Kelompok Yang Naik Kelas (kel)	11
		Jumlah Kelompok Usaha Perikanan administrasinya baik	11
16	Terlaksananya ketersediaan bahan pangan asal ikan	Jumlah ketersediaan bahan pangan asal ikan(ton)	6.700
17	Terlaksananya pemeriksaan bahan pangan asal ikan	Jumlah Sampel yang periksa (sample)	10
18	terlaksananya promosi usahahasil perikanan	Jumlah promosi yang dilaksanakan (kali)	4





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

---





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

##### 1. Capaian Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Tapin

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Capaian			% Capaian
				2021	2020	2019	
1	Ketersediaan Pangan asal ikan	Jumlah ketersediaan ikan (ton)	8312,40	13.411,84	5.049,81	4305,6	161,35 (%)
2	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan (ton)	4578,40	3.725,06	4.481,30	324	81,36 (%)

Ada penurunan di sektor budidaya perikanan dimana produksi tahun 2021 adalah sebesar 3.725,06 Ton.

Untuk peningkatan produksi budidaya disarankan untuk diadakan revitalisasi lahan budidaya ikan yang tidak lagi beroperasi untuk lahan-lahan yg terbentur faktor keasaman lahan ataupun air di wilayah kegiatan budidaya tersebut.

##### 2. Capaian Kinerja Utama Bidang Budidaya Perikanan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (2021)	Capaian (2021)	% Capaian	Keterangan
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase kenaikan Produksi Ikan Budidaya	8.053,57	13.419,15	166,62%	Kabid Perikanan Budidaya /Es.III





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

Indikator kinerja Kabid Perikanan Budidaya adalah Produksi ikan dari hasil budidaya tahun 2021 sebesar 299,083 Ton dan dibandingkan target tahun 2021 adalah sebesar 349,42 Ton sehingga pencapaian persentase kenaikan produksi ikan budidaya taun 2021 adalah sebesar 85,59 %. Untuk rincian hasil produksi ikan dari hasil budidaya adalah sebagai berikut :

Kecamatan/Sub District	Perikanan Darat/ Inland Fishery
	Produksi (Ton)
(1)	(4)
010. Benuang	-
011. Hatungun	2.797
020. Tapin Selatan	2.525
021. Salam Babaris	50
030. Tapin Tengah	6.862
040. Bungur	115.119
050. Piani	2.648
060. Lokpaikat	2.946
070. Tapin Utara	44.600
080. Bakarangan	8.350
090. Candi Laras Selatan	60.680
100. Candi Laras Utara	30.430
Jumlah/Total	277.007

Hasil Capaian tahun 2021 terjadi kenaikan terhadap capaian tahun 2020 yang sebesar 166,62% walaupun masih terjadi pengeringan irigasi ketika terjadi perbaikan saluran irigasi, sebagaimana surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Nomor : PW.0201/Bws9/689 Perihal Permohonan Dukungan untuk Penutupan Pintu Intake Bendung Linuh (Pengeringan Saluran) tanggal 20 Juli 2020.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Capaian
-------------------	-------------------	---------	---------





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

		2021	2020
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase kenaikan Produksi Ikan Budidaya 95,83%	85,59%

### A. KASI PERBENIHAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (2021)	Capaian (2021)	% Capaian	Keterangan
Terlaksananya Perbenihan Ikan	Jumlah Produksi Benih yang unggul dan berkualitas (ekor)	20.000.000	1.572.120	7,86%	Kasi Perbenihan Ikan / Es.IV

Untuk tahun 2021 kegiatan untuk mendukung sasaran strategis terlaksananya perbenihan ikan pada Kasi perbenihan tidak ada, sehingga untuk bantuan kepada pembudidaya perbenihan tidak ada, baik itu induk ikan ataupun sarana produksi. Jumlah produksi benih yg dihasilkan oleh pembudidaya perbenihan ikan adalah sebesar 1.572.120 ekor. Dengan uraian produksi benih sebagai berikut :

### REKAP PRODUKSI BENIH TAHUN 2021 DINAS PERIKANAN KABUPATEN TAPIN

Bulan	Total	Jenis ikan
-------	-------	------------





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

	produksi	Mas (Cyprinus carpio)	Nila (Oreochrom is niloticus)
Januari	184.700	159.700	25.000
Februari	124.900	97.000	27.900
Maret	65.000	60.000	5.000
April	122.650	110.150	12.500
Mei	145.630	110.630	35.000
Juni	146.750	89.500	57.250
Juli	123.000	100.000	23.000
Agust	105.000	105.000	-
Sept	52.115	52.115	-
Okt	78.450	78.450	-
Nov	165.000	165.000	-
Des	258.925	258.925	-
Grand Total	1.572.120	1.386.470	185.650

Sumber Data : Laporan tahunan bidang Budidaya Diskan 2021

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV	REALISASI 1 THN (%)	KET
1	Meningkatkan Produksi Benih Ikan	Ikan Nila	100.000	-	16.000	15.750	23.000	35%	
		Ikan Patin	50.000	-	18.000	-	-	35%	
		Ikan Gurame	10.000	-	3.000	-	1.700	45%	
		Ikan Betok	1.500	-	-	-	1.700	90%	

Hasil capaian tahun 2021 terjadi penurunan yang sangat besar karena faktor permintaan terhadap benih ikan sangat rendah diakibatkan wabah covid 19 yang terjadi disepanjang tahun 2021. Selain itu, masih terjadi pengeringan irigasi ketika terjadi perbaikan saluran irigasi, sebagaimana surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen Sumber Daya





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Nomor : PW.0201/Bws9/689 Perihal Permohonan Dukungan untuk Penutupan Pintu Intake Bendung Linuh (Pengerangan Saluran) tanggal 20 Juli 2020.

 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR  
BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN II  
Jalan Tambun Bungai No. 26 Telp. (0513) 22085 – 22086 Kuala Kapuas, Kalteng 73514

Kuala Kapuas, 20 Juli 2020

Nomor : PW.0201/Bws9/689  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Dukungan Untuk Penutupan Pintu Intake Bendung Linuh (Pengerangan Saluran)

Yth.  
Bupati Kabupaten Tapin  
Provinsi Kalimantan Selatan  
di -  
Rantau

Sehubungan dengan kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Tapin di Kabupaten Tapin, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. D. I Tapin merupakan Daerah Irigasi Premium yang ketersediaan airnya selalu terjaga dengan hadirnya Bendungan Tapin
2. Akan dilaksanakan rehabilitasi saluran dan pengembangan D.I Tapin pada tahun 2020 – 2022
3. Untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi dibutuhkan pengerangan saluran dengan melakukan penutupan sementara pintu intake
4. Berdasarkan poin-poin di atas, di mohon dengan hormat dukungan dari Bapak dalam penutupan pintu intake di Bendung Linuh.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II  
  
Fikri Abdurrahman, ST., M.Sc  
NIP. 49171222 200502 1 002

Tembusan Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin, di Rantau
2. Asisten I Pembangunan Kabupaten Tapin, di Rantau
3. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tapin, di Rantau
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapin, di Rantau
5. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tapin, di Rantau
6. Kepala Seksi Pelaksanaan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II, di Kuala Kapuas
7. Kepala SNVT PJPA WS, Barito Provinsi Kalimantan Selatan, di Banjarmasin
8. PPK Irigasi dan Rawa II, di Banjarmasin





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

### B. KASI PEMBUDIDAYAAN IKAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (2021)	Capaian (2021)	% Capaian	Keterangan
Terlaksananya fasilitasi Sarana produksi dan sarana prasarana budidaya Perikanan	Jumlah kelompok yang di bantu sarana produksi (Kelompok)	6	6	100,00%	Kabid Perikanan Budidaya /Es.III
	Jumlah kelompok pengguna Kolam Plastik (Kelompok)	3	3	100,00%	Jumlah kelompok pengguna Kolam Plastik (Kelompok)
	Luasan Areal Budidaya ikan (m <sup>2</sup> )	5.000	5.000	100,00%	Luasan Areal Budidaya ikan (m <sup>2</sup> )

Pada Kasi Pembudidayaan Ikan ada 3 indikator dimana semua tercapai bahkan melebihi target. Yang pertama jumlah produksi yang dibantu sarana Produksinya sebanyak 6 Kelompok. Indikator yang kedua jumlah kelompok pengguna kolam plastik yaitu 3 kelompok. Dan indikator yang ketiga adalah luasan budidaya ikan sebesar 5.000 m<sup>2</sup>.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV	REALISASI 1 THN (%)	KET
1	Terlaksananya fasilitasi produksi dan sarana prasarana budidaya perikanan	Jumlah kelompok yang dibantu sarana produksi (Kel)	6	-	-	-	6	100%	
		Jumlah kelompok pengguna kolam plastik (Kel)	3	1	1	1	-	100%	
		Perluasan areal budidaya (m <sup>2</sup> )	5.000	1.500	2.000	1.500	-	100%	

Untuk perbandingan dengan tahun 2021 dengan 2020 dimana jumlah produksi yang dibantu sarana Produksinya tahun 2021 tercapai 1.433%,





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

jumlah kelompok pengguna kolam plastik sama-sama realisasinya 100% dan indikator yang ketiga adalah luasan budidaya ikan dengan realisasi 4.000m<sup>2</sup> sehingga tercapai 100%.

### C. Kasi Pakan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Capaian
Tercukupinya Pakan Ikan	Jumlah Pakan Yang Diproduksi (Kg)	100	70	70,00%
	Jumlah Pakan Yang Masuk (Ton)	550,335	377,134	68,53%
Terlaksananya Pengendalian Hama Dan Penyakit Ikan	Jumlah Kasus Hama Dan Penyakit Perikanan Budidaya Yang Ditangani (kasus)	2	1	50,00%
Terlaksananya uji sampel kawasan budidaya	Jumlah pemantauan lingkungan budidaya (kali)	12	12	100,00%

Pada Kasi Pakan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan pada sasaran strategis yang pertama jumlah targetnya adalah 100 kg pakan yang diproduksi dan jumlah realisasinya 70 kg dimana persentasi pencapaian adalah 70%.

Pada sasaran strategis yang kedua yaitu terlaksananya pengendalian hama dan penyakit ikan dimana ada 1 kasus yang ditangani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

Dan untuk sasaran strategis yang ketiga yaitu terlaksananya uji sampel kawasan budidaya dimana ada melakukan 12 kali pemantauan pada tahun 2021 sehingga mencapai target kegiatan dalam perjanjian kinerja tahun 2021.

Untuk perbandingan dengan kinerja tahun 2020. Pada tahun 2020 pada jumlah pakan yang diproduksi terealisasi 132% sedangkan tahun 2021 70% karena targetnya ditingkatkan 100% dari 50 Kg menjadi 100 Kg dan terealisasi 70 Kg saja.

### 3. Capaian Kinerja Utama Bidang Perikanan Tangkap dan SDI

N O	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (2021)	Capaian (2021)	% Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi hasil perikanan tangkap	3.627,29	4.041,45	111,42%	Kabid Perikanan Tangkap dan SDI / Es. III

Sasaran strategis untuk bidang perikanan tangkap dan Sdi yaitu persentasi kenaikan produksi ikan tangkap dengan realisasi 111,42 % dimana ini melebihi target 100%. Dalam hal ini jumlah produksi ikan hasil tangkapan pada tahun 2021 adalah sebesar 4.041,45 Ton dengan rincian sebagai berikut :

Kecamatan/Sub District	Jenis Perairan/Kind of Water		Jumlah/Total (Ton)
	Sungai/River (Ton)	Rawa/Swamp (Ton)	
(1)	(2)	(3)	(4)
010. Benuang	34,00	29,46	63,46
011. Hatungun	0	0	0
020. Tapin Selatan	142,27	123,29	265,56
021. Salam Babaris	0	0	0
030. Tapin Tengah	373,98	323,42	697,40
040. Bungur	52,62	45,60	98,22
050. Piani	0	0	0
060. Lokpaikat	0	0	0
070. Tapin Utara	77,31	67,00	144,31
080. Bakarangan	451,29	391,09	842,38
090. Candi Selatan	492,23	426,55	918,78
100. Candi Laras Utara	541,81	469,53	1.011,34
Jumlah/Total	2165,51	1875,94	4041,45



# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

### A. Kasi Pemanfaatan Sumberdaya Ikan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (2021)	Capaian (2021)	% Capaian	Keterangan
Terlaksananya fasilitas sarana dan prasarana Perikanan Tangkap	Jumlah alat tangkap yang diserahkan kepada KUB (Paket)	3	3	100	
Terlaksananya benih ikan yang ditebar (Restocking)	Jumlah anak ikan yang ditebar/dilepasliarkan (ekor)	8.000	0	0	Pemotongan Anggaran
Tersedianya data kelompok Perikanan Tangkap	Data Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Update (kelompok)	75	75	100	
Terlaksananya pemeriksaan sampel kawasan perairan umum	Jumlah lokasi sampel kawasan perikanan dengan data akurat (lokasi)	4	4	100	
Terlaksananya fasilitas bantuan premi Asuransi Nelayan (Sumber dana APBN)	Jumlah nelayan yang difasilitasi bantuan pendanaan /pembiayaan BPAN tahun 2021 (orang)	250	0	0	Dibatalkan karena kegiatan inti dipotong

Pada Kasi Pemanfaatan Sumberdaya Ikan untuk sasaran strategis yang pertama yaitu Terlaksananya Fasilitas sarana dan prasarana Perikanan Tangkap (Sumber dana APBD Provinsi) dengan indikator kinerja jumlah alat tangkap ini tidak tercapai disebabkan Kegiatan dibatalkan karena Pemotongan Anggaran untuk mendukung penanganan Pandemi covid 19. Dibandingkan dengan tahun 2019 Realisasi Jumlah penambahan kapal penangkap ikan <3 GT adalah sebanyak 5 buah dan ada 4 paket jumlah alat tangkap.

Untuk sasaran strategis yang kedua yaitu Tersedianya Data Kelompok Perikanan Tangkap dan indikator Data Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Up date (Kelompok) bisa terlaksana 100%.

Dan untuk sasaran strategis yang terakhir yaitu Terlaksananya Fasilitas Bantuan Premi Asuransi Nelayan (Sumber dana APBN) dengan indikator





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

Jumlah peserta kusuka yang di usulkan sebagai calon penerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) tahun 2021 (orang) juga sama tidak bisa tercapaian disebabkan Kegiatan dibatalkan karena Pemotongan Anggaran untuk mendukung penanganan Pandemi covid 19

### B. Kasi Pengendalian Sumberdaya Ikan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (2021)	Capaian (2021)	% Capaian	Keterangan
Terlaksananya sosialisasi UU Perikanan	Jumlah pemasangan spanduk Seruan Illegal Fishing (buah)	14	14	100	
	Jumlah pembuatan stiker Seruan Illegal Fishing (lembar)	200	200	100	
Terlaksananya pemantauan kawasan Perikanan Tangkap	Jumlah razia/patrol terpadu (kali)	12	15	125	
	Jumlah pemantauan penangkapan dan penjualan anak ikan (kali)	10	8	80	
Terlaksananya fasilitasi sarana dan prasarana pengawasan	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara (buah)	2	2	100	

Kasi Pengendalian Sumberdaya Ikan terdapat 2 sasaran strategis yaitu terlaksananya sosialisasi UU Perikanan dan terlaksananya pemantauan kawasan perikanan tangkap. Terlaksananya sosialisasi UU Perikanan ada satu indikator kinerja yaitu jumlah sosialisasi UU Perikanan yang pada tahun 2021 ditarget 3 kali dan dengan realisasi 2 kali sehingga pencapaian pada tahun 2021 adalah 66,67%. pencapaian tidak bisa 100% tercapai karena adanya pengurangan untuk Pandemi covid 19 (menurangi kerumunan) dan dibandingkan tahun 2019 dimana kegiatan 100% tercapai karena pada tahun 2019 yang berjalan sesuai targetnya. Menjaga





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

kelestarian sumber daya ikan agar ikan – ikan lokal tidak cepat punah dan tetap bisa memberikan mata pencaharian bagi sebagian anggota masyarakat terutama para petani nelayan. Kesempatan ini juga di harapkan dengan sangat sekali kepada rekan- rekan anggota Pokmaswas yang sudah mengetahui akan arti penting nya Kelestarian Sumberdaya Perikanan Perairan Umum, bisa memberitahukan kembali pada masyarakat yang belum tahu.

### a. Pemasangan Brosur dan Spanduk

Pemasangan brosur dan Spanduk tentang Larangan Menangkap Ikan dengan Alat Strum dan Bahan Kimia Berbahaya (B3) dan larangan penjualan anak – anak ikan dilaksanakan dalam rangka pentaatan hukum terhadap masyarakat. Berikut lokasi pemasangan spanduk dan pembagian Brosur :

No	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Stiker	200 Lembar	Tersebar di 12 Kecamatan
2	Spanduk	14 Buah	Tersebar di 3 Kecamatan

Dinas Perikanan Kabupaten Tapin melaksanakan Razia Terpadu /Patroli Bersama dengan Polri, TNI, Satpol PP dan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) untuk mencegah terjadinya penangkapan ikan secara illegal (Illegal Fishing) di Perairan Umum. Kegiatan operasional illegal fishing dilaksanakan dari bulan Januari – Desember. Kegiatan tersebut dilaksanakan karena masih banyaknya kegiatan masyarakat yang menggunakan cara penangkapan ikan dengan alat bantu yang tidak ramah lingkungan (setrum dan Bahan Beracun Berbahaya) yang dapat mengakibatkan terganggunya kelestarian lingkungan dan sumberdaya ikan di perairan umum. Berikut Razia terpadu yang sudah di laksanakan oleh Bidang Perikanan tangkap dan Sumber Daya Ikan Tahun 2021 :





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

---





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

NO	TANGGAL	LOKASI JAM	HASIL
1	06 – 07 Feb 2021	Kec. CLS Jam 15.00 s/d pukul 03.15 WITA	Tidak ditemukan Pelanggar Illegal Fishing
2	24 - 25 Juni 2021	Kec. CLS Jam 15.00 s/d pukul 03.15 WITA	Tidak ditemukan Pelanggar Illegal Fishing
3	20 – 21 Agustus 2021	Kec. CLS Jam 15.00 s/d pukul 03.15 WITA	Ditemukan 1 pelanggaran Illegal fishing menggunakan alat setrum dan perahu bemesin. dan tidak bemesin pelaku berhasil kabur dengan meninggalkan barang bukti
4	23 – 24 Agustus 2021	Kec. CLU Jam 15.00 s/d pukul 03.15 WITA	Tidak ditemukan Pelanggar Illegal Fishing
5	24 – 25 September 2021	Kec. Bakarangan Jam 15.00 s/d pukul 03.15 WITA	Tidak ditemukan Pelanggar Illegal Fishing
6	27 – 28 September 2021	Kec. Bakarangan Jam 15.00 s/d pukul 03.15 WITA	Tidak ditemukan Pelanggar Illegal Fishing
7	01- 02 Oktober 2021	Kec. CLU Jam 15.00 s/d pukul 03.15 WITA	Tidak ditemukan Pelanggar Illegal Fishing
8	31 Oktober dan 01 Nopember 2021	Kec. CLS Jam 15.00 s/d pukul 03.15 WITA	Ditemukan 1 pelanggaran Illegal fishing menggunakan alat setrum dan perahu bemesin. pelaku berhasil kabur dengan meninggalkan barang bukti
9	08 – 09 Nopember 2021	Kec. CLU Jam 15.00 s/d pukul 03.15 WITA	Tidak ditemukan Pelanggar Illegal Fishing
10	15 – 16 Nopember 2021	Kec. CLS Jam 15.00 s/d pukul 03.15 WITA	Tidak ditemukan Pelanggar Illegal Fishing
11	20 -21 Nopember 2021	Kec. Bakarangan Jam 15.00 s/d pukul 03.15 WITA	Tidak ditemukan Pelanggar Illegal Fishing
12	23 – 24 Nopember 2021	Kec. Bakarangan Jam 15.00 s/d pukul 03.15 WITA	Tidak ditemukan Pelanggar Illegal Fishing
13	04 Desember 2021	Kec. Tapin Utara Jam 04.00 s/d pukul 08.00 WITA	Ditemukan 1 pedagang yg menjual anak ikan dan mendapat teguran dari aparat, karena untuk kegiatan berikutnya apabila





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

---

			masih menjual anak-anak ikan akan ditindak langsung di tempat.
14 e	13 Desember 2021 B	Kec. Tapin Utara Jam 04.00 s/d pukul 08.00 WITA	Tidak ditemukan Pelanggar Illegal Fishing

riku

Kegiatan Pemantauan penangkapan dan jual beli anak ikan dilaksanakan dengan tujuan untuk menjaga agar ikan-ikan lokal tidak cepat punah dan tetap bisa sebagai mata pencaharian bagi sebagian masyarakat terutama para petani nelayan. Mengingat ekosistem ikan harus dijaga maka anak – anak ikan harus dijaga untuk dilestarikan, jika terus ditangkap dan diperjualbelikan untuk dikonsumsi dikhawatirkan akan menjadi langka. Jadwal kegiatan pemantauan penangkapan dan jual beli anak ikan sebagai berikut :

NO	WAKTU PELAKSANAAN	LOKASI
----	-------------------	--------





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

1.	Jum'at, 03 Desember 2021	Pasar Keraton Rantau
2.	Senin, 06 Desember 2021	
3.	Rabu, 08 Desember 2021	
4.	Sabtu, 15 Desember 2021	

Berdasarkan hasil pemantauan dilapangan tidak ditemukan jual beli dalam jumlah besar sehingga hanya perlu disosialisasikan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan di Kalimantan Selatan Pasal 10 dan Pasal 11 yaitu larangan menangkap dan memperjualbelikan anak-anak ikan beserta ancaman pidananya.

### 3. Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (2021)	Capaian (2021)	% Capaian	Keterangan
Meningkatkan klasifikasi kelompok Usaha Perikanan	Persentase kelompok Usaha Perikanan yang meningkat klasifikasinya (%)	8	11	137,5	Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan / Es. III

Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan bertanggung jawab atas sasaran strategis meningkatkan klasifikasi kelompok usaha perikanan dengan indikator kinerja persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat klasifikasinya. Target pada tahun 2021 yaitu 100% dengan jumlah kelompoknya yaitu 10 kelompok dan realisasinya 10 kelompok sehingga pencapaiannya pada tahun 2021 adalah 100%. Untuk perbandingan pada tahun 2019 tercapai 100% dengan jumlah kelompok 11 kelompok.

#### A. Kasi Kemitraan, Pendidikan dan Pelatihan





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Capaian
Terlaksananya Kemitraan Bidang Perikanan	Jumlah Rekomendasi Yang Dikeluarkan	2	0	0,00%
	Persentase Kelompok Bermitra Yang Dibina	1	1	100,00%
Terlaksananya Diklat Usaha Perikanan	Prosentasi Kelompok yang mengikuti DIKLAT Usaha Perikanan	2	0	0,00%

Indikator kinerja pada Kasi Kemitraan, pendidikan dan pelatihan ini ada 3 yaitu jumlah rekomendasi yang dikeluarkan, persentase kelompok yang bermitra dan prosentasi kelompok yang mengikuti Diklat Usaha perikanan. Rekomendasi yang dikeluarkan pada tahun 2021 hanya 1 saja untuk kegiatan mengakuan keterangan usaha perikanan, sedangkan untuk persentase kelompok yang bermitra yang dibina tidak ada target pada tahun 2021 karena tidak ada anggaran untuk melakukan pembinaan.

### B. Kasi Penumbuhkembangan Kelompok

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Capaian
Terlaksananya pembinaan kelompok Usaha Perikanan	Jumlah Kelompok baru (kel)	11	11	100,00%
	Jumlah Kelompok Yang Naik Kelas (kel)	11	11	100,00%
	Jumlah Kelompok Usaha Perikanan administrasinya baik	11	11	100,00%
Terlaksananya ketersediaan bahan pangan asal ikan	Jumlah ketersediaan bahan pangan asal ikan(ton)	6.700	5.326	79,49%
Terlaksananya pemeriksaan bahan pangan asal ikan	Jumlah Sampel yang periksa (sample)	10	5	50,00%
Terlaksananya promosi usahahasil perikanan	jumlah promosi yang dilaksanakan (kali)	4	4	100,00%

Nama kelompok Perikanan baru tahun 2021 di kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JUMLAH ANGGOTA	NAMA PETUGAS	KET.
-----	---------------	--------	----------------	--------------	------





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

1.	Pesona Ikan Tawar	Desa Teluk Haur Kecamatan CLU	16 orang	Ir. Maskuni	Pokdakan
2.	Putra Mangkubut	Desa Candi Laras Kecamatan CLS	13 orang	Ir. Husin Hepnii	KUB
3.	Berkah Usaha Bersama	Desa Pulau Pinang Utara Kec. Binuang	10 orang	Ramlah, S.Pi	Pokdakan
4.	Jaha Maju Bersama	Desa Purut Kecamatan Bungur	14 orang	Mutmainah, S.Pi	Pokdakan
5.	Batang Lantik Berkah	Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah	17 orang	Norhidayah, S.Pi	Pokdakan
6.	Baruh Kapar	Desa Masta Kecamatan Bakarangan	25 orang	Rendra Fahlovie, S.Pi	KUB
7.	Berkat Usaha	Desa Buas-Buas Kecamatan CLU	15 orang	M.Harris Agusfiyanto, S.Pi	KUB
8.	Sungai Puyau	Desa Pabaungan Hulu Kecamatan CLS	14 orang	Ir. H. Iqrabi	KUB
9.	Lumbu Raya Maju Bersama	Desa Lumbu Raya Kecamatan Tapin Utara	27orang	Hj. Noor Linda	Pokdakan
10.	Ngerumat Bondo	Desa Batu Hapu Kecamatan Hatungun	10 orang	H. Irawan, SP	KUB
11.	Berkat Membangun Bersama	Desa Suato Tatakan Kec. Tapin Selatan	10 orang	Suprayitno, A.Md	Pokdakan

Nama kelompok perikanan naik kelas tahun 2021 di kab. Tapin adalah sebagai berikut :





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

NO.	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JUMLAH ANGGOTA	NAMA PETUGAS	KET.
1.	Harapan maju	Desa Gadung Kec. Bakarangan	14 orang	Rendra Fahlovie, S.Pi	KUB
2.	Balupo	Desa Teluk Haur Ke. Andi Laras Utara	10 orang	Ir. Maskuni	KUB
3.	Berkat Cangkal	Desa Baringin B Kec. Andi Laras Selatan	12 orang	Ir. Husin Hefni	KUB
4.	Wira Usaha	Desa Batalas Kec. Candi Laras Utara	14 orang	Anna Noor Erlinda, S.Pi	KUB
5.	Sinar Pabaungan Jaya	Desa Pabaungan Hilir Kec. Candi Laras Selatan	10 orang	Ir. H. Iqrabi	Pokdakan
6.	Kawula Pantai	Desa Pabaungan Pantai Kec. Candi Laras Selatan	14 orang	M. Harris Agusfiyanto, S.Pi	KUB
7.	Danau Behkah Kalumpang	Desa kalumpang Ke. Bungur	16 Orang	Mutmainah, S.Pi	Pokdakan
8.	Mina Berkat Jaya	Desa Harapan Masa Kec. Tapin Selatan	14 orang	Suprayitno, A.Md	Pokdakan
9.	Selangit	Kelurahan Bitahan Ke. Lokpaikat	10 orang	Norhidayah, S.Pi	Pokdakan
10.	Karya Jaya	Kelurahan Binuang Kec. Binuang	13 orang	Ramlah, S.Pi	Pokdakan
11.	Karya Bersama	Desa Margasari Hilir Kec. Candi Laras Utara	10 orang	Irawan, SP	KUB





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

**Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:**

1. Keberhasilan suatu kegiatan sangat ditentukan oleh kerja sama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan dukungan anggaran dari tingkat Pusat sampai Daerah.
2. Selain alokasi dana APBD Kabupaten, maka dukungan dana dan pembinaan baik dari Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian terkait amat besar pengaruhnya dalam menentukan pencapaian keberhasilan sasaran strategis SKPD.

### **Permasalahan Yang Dihadapi**

#### **a. Penangkapan Ikan di Perairan Umum**

- ✓ Fungsi dan peran pokwasmas masih belum optimal dalam rangka menekan angka **Illegal Fishing**
- ✓ Aspek pengawasan dan perlindungan sumberdaya perikanan perairan umum dengan segala keterbatasan yang ada memerlukan penanganan dan perhatian yang lebih khusus dari semua pihak.
- ✓ Minimnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan pengawasan khususnya transportasi air seperti kelotok, speed boat, serta alat komunikasi standard dan menara pengawasan
- ✓ Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sumberdaya perikanan yang mengakibatkan kelangkaan jenis - jenis ikan yang menjadi mata pencaharian masyarakat itu sendiri khususnya masyarakat yang tinggal di lingkungan perairan itu sendiri.
- ✓ Masih maraknya alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan / dilarang UU Perikanan oleh oknum - oknum yang tidak bertanggung jawab

#### **b. Budidaya air Tawar**

- ✓ Sarana pembenihan (UPR dan BBI) belum berfungsi optimal





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

- ✓ Daya dukung sarana dan prasarana masih kurang
- ✓ Belum optimalnya pemanfaatan potensi rawa
- ✓ Masih rendahnya Luas Areal budidaya jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki dan terbatas serta belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki
- ✓ Kontinuitas ketersediaan air yang tidak tersedia sepanjang tahun, bencana banjir, dan pencemaran air sehingga terjadinya kematian ikan yang menyebabkan keengganan petani budidaya untuk melakukan budidaya.
- ✓ Belum seimbang antara kebutuhan Sarana produksi dan luasan potensi sumberdaya perikanan karena keterbatasan anggaran dan modal yang dimiliki petani ikan
- ✓ Ketersediaan air sebagai sumber air bagi budidaya kolam

### Upaya Mengatasinya

- a. Penangkapan Ikan di Perairan Umum
  - ✓ Melakukan berbagai kegiatan pelestarian lingkungan seperti pelaksanaan kegiatan pengembangan reservat serta kegiatan restocking yang berfungsi untuk mengembalikan keberadaan jenis-jenis ikan tertentu dalam suatu perairan
  - ✓ Meningkatkan pembinaan dan pengarahan kepada masyarakat tentang arti penting pelestarian SDI
  - ✓ Melakukan koordinasi dan pengawasan secara intensif bersama-sama instansi terkait
  - ✓ Memberikan solusi kegiatan usaha alternative selain usaha penangkapan sehingga petani tetap dapat mencukupi kebutuhan dan meningkatkan pendapatannya





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

- ✓ Menggalang, menggunakan sekaligus membina SIWASMAS dengan membentuk POKWASMAS dengan mengupayakan sarana dan prasarana pendukung guna mendukung optimalnya fungsi dan peran pokwasmas
  - ✓ Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengawasan seperti kelotok, speed boat, garasi speed boat dan alat komunikasi standar
  - ✓ Melaksanakan Sosialisasi UU Perikanan dan lebih menekankan pada pentingnya pelestarian Sumberdaya Perikanan.
  - ✓ Meningkatkan razia Gabungan dan menindak tegas oknum - oknum yang tidak bertanggung jawab
- b. Pengembangan Budidaya Air Tawar :
- ✓ Optimalisasi UPR dan BBI Binuang serta BBI Lokal Linuh
  - ✓ Perlunya penambahan sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya
  - ✓ Optimalisasi rawa melalui usaha budidaya ikan lokal ekonomis beserta peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang.
  - ✓ Penambahan sarana dan prasarana dan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana untuk peningkatan hasil produksi perikanan.
  - ✓ Koordinasi antar instansi Pemerintah dan Perusahaan dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan
  - ✓ Adanya penyediaan paket - paket percontohan budidaya serta permodalan dalam peningkatan produksi





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

### B. Realisasi Anggaran

Tabel Realisasi Anggaran perprogram dan Kegiatan tahun 2021

KODE	KEGIATAN	ANGGARAN	TOTAL	%
3.01 . 3.01.01.01 . 01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	42.484.500,00	42.413.100,00	99,83
3.01 . 3.01.01.01 . 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.484.500,00	42.413.100,00	99,83
3.01 . 3.01.01.01 . 02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	41.500.000,00	41.482.300,00	99,96
3.01 . 3.01.01.01 . 02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.600.000,00	22.582.300,00	99,92
3.01 . 3.01.01.01 . 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18.900.000,00	18.900.000,00	100,00
3.01 . 3.01.01.01 . 06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	480.349.100,00	513.612.000,00	106,92
3.01 . 3.01.01.01 . 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.024.000,00	3.024.000,00	100,00
3.01 . 3.01.01.01 . 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.842.000,00	42.484.800,00	99,17
3.01 . 3.01.01.01 . 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.737.100,00	57.802.200,00	80,58
3.01 . 3.01.01.01 . 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	2.535.000,00	52,81
3.01 . 3.01.01.01 . 06.07	Penyediaan Bahan/Material	3.250.000,00	0,00	0,00
3.01 . 3.01.01.01 . 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.400.000,00	1.605.000,00	66,88
3.01 . 3.01.01.01 . 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	352.296.000,00	406.161.000,00	115,29
3.01 . 3.01.01.01 . 07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	172.272.900,00	169.414.000,00	98,34
3.01 . 3.01.01.01 . 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98.691.200,00	96.120.000,00	97,39
3.01 . 3.01.01.01 . 07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	73.581.700,00	73.294.000,00	99,61
3.01 . 3.01.01.01 . 08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	132.938.400,00	98.730.701,00	74,27
3.01 . 3.01.01.01 . 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.638.400,00	64.830.701,00	76,60
3.01 . 3.01.01.01 . 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.300.000,00	33.900.000,00	70,19
3.01 . 3.01.01.01 . 09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	166.660.000,00	107.396.303,00	64,44





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
3.01 . 3.01.01.01 . 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	115.212.000,00	92.936.303,00	80,67
3.01 . 3.01.01.01 . 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.040.000,00	14.460.000,00	96,14
3.01 . 3.01.01.01 . 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.408.000,00	0,00	0,00
3.01 . 3.01.01.01 . 15	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	17.514.000,00	16.125.000,00	92,07
3.01 . 3.01.01.01 . 15.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	9.339.000,00	9.000.000,00	96,37
3.01 . 3.01.01.01 . 15.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	8.175.000,00	7.125.000,00	87,16
3.01 . 3.01.01.01 . 16	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	24.750.000,00	3.462.500,00	13,99
3.01 . 3.01.01.01 . 16.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	24.750.000,00	3.462.500,00	13,99
3.01 . 3.01.01.01 . 22	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00
3.01 . 3.01.01.01 . 22.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00
3.01 . 3.01.01.01 . 24	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	1.138.976.700,00	584.967.930,00	51,36
3.01 . 3.01.01.01 . 24.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	853.528.000,00	309.810.900,00	36,30
3.01 . 3.01.01.01 . 24.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	266.948.700,00	259.277.030,00	97,13
3.01 . 3.01.01.01 . 24.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	18.500.000,00	15.880.000,00	85,84
3.01 . 3.01.01.01 . 25	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air</b>	117.410.000,00	114.275.400,00	97,33
3.01 . 3.01.01.01 . 25.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	117.410.000,00	114.275.400,00	97,33
3.01 . 3.01.01.01 . 26	<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	36.500.000,00	36.000.000,00	98,63
3.01 . 3.01.01.01 .	Penyediaan Data dan Informasi Usaha	36.500.000,00	36.000.000,00	98,63





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

26.01	Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
3.01 . 3.01.01.01 . 27	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	10.500.000,00	8.450.000,00	80,48
3.01 . 3.01.01.01 . 27.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	10.500.000,00	8.450.000,00	80,48
3.01 . 3.01.01.01 . 28	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	110.504.600,00	103.389.600,00	93,56
3.01 . 3.01.01.01 . 28.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	103.048.100,00	99.983.100,00	97,03
3.01 . 3.01.01.01 . 28.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.456.500,00	3.406.500,00	45,68
<b>JUMLAH</b>		2.504.860.200,00	1.852.218.834,00	73,94

### 3.1.5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya merupakan jawaban atas Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang telah menjadi fokus Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang digunakan sudah secara optimal melaksanakan kinerja pada masing-masing bidang di Bappelitbang, dibantu juga dengan adanya aplikasi berbasis web seperti e-office guna menunjang peningkatan kinerja. Adapun kendala kekurangan personel pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dapat diatasi dengan rekrutmen tenaga kontrak yang mampu membantu tugas-tugas dan kegiatan yang ada pada masing-masing bidang.

b. Sarana dan Prasarana

Dukungan sarana dan prasarana yang baik akan menunjang pencapaian kinerja organisasi. Ketersediaan sarana dan prasarana pada Bappelitbang dirasa sudah cukup memadai sesuai dengan kebutuhan dalam melakukan kegiatan dan pelayanan kepada Perangkat Daerah. Hal ini berbanding lurus dengan tersedianya anggaran untuk perawatan dan pemeliharaan dari sarana dan prasarana tersebut.

c. Anggaran





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

---

Indikator ini didukung dengan pagu anggaran yang ada pada DPA Dinas Perikanan Tahun 2021 sebesar **Rp 2.504.860.200,00** dan terserap sebesar **Rp 1.852.218.834,00 (73,94%)**.





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

### BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Laporan ini disajikan setelah mendapatkan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Tahun 2020 dari Inspektorat Kabupaten Tapin. Laporan ini bertujuan untuk menyajikan informasi kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai untuk melakukan upaya dalam peningkatan kinerja organisasi.

Dinas Perikanan Kabupaten Tapin pada Tahun 2021 telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang bersifat administrasi dan program pembangunan perikanan yang berasal dari sumber dana APBD Kabupaten. Pada tahun 2021, Dinas Perikanan Kabupaten Tapin menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja utama sesuai dengan Dokumen Perubahan IKU Rencana Strategis 2018-2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2021.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Tapin telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja sehingga dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis organisasi. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator berikut :

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% s.d 100%	Baik (B)
3	55% s.d 75%	Cukup (C)





# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PERIKANAN

4	Kurang dari 55%	Kurang (K)
---	-----------------	------------

Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Tapin Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa :

1. Indikator Kinerja Utama dengan persentase capaian Kinerja Dinas Perikanan dengan persentase **capaian kinerja > 100%** atau **Baik Sekali (BS)** sebanyak 1 indikator yaitu 161,35 %
2. Indikator Kinerja Utama dengan persentase capaian Kinerja Dinas Perikanan dengan persentase **capaian kinerja 75% s.d 100%** atau **Baik (B)** sebanyak 1 indikator yaitu 81,36 %

Berbagai hambatan seringkali ditemukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Tapin selama tahun 2021, namun secara umum program/kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Dinas Perikanan Kab.Tapin akan terus mengupayakan melalui motivasi, kerja keras, sinergitas, inovasi dan kolaborasi bersama masyarakat dan semua pihak.

Dalam upaya mencapai sasaran strategis dinas, maka mutlak hasil evaluasi kinerja tahun ini baik yang tercapai maupun yang belum tercapai serta faktor-faktor yang mempengaruhinya akan menjadi bahan pembelajaran dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun ke depan sehingga target-target kinerja bisa tercapai. Dengan komitmen dan tekad yang kuat, kerjasama yang solid di semua jajaran dinas/instansi terkait dan peningkatan kualitas etos kerja, mengoptimalkan potensi daerah dan sumberdaya yang ada serta terus memperbaiki fungsi manajemen dan





# **PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

## **DINAS PERIKANAN**

---

tahap perencanaan, maka optimisme untuk terus melakukan peningkatan kinerja akan dapat diwujudkan.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang tugas pokok dan fungsi Perikanan Kabupaten Tapin dan hasil-hasilnya.



# LAMPIRAN

**PENCAPAIAN KINERJA  
DINAS PERIKANAN  
TAHUN 2021**

<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>% Capaian</b>
<b>KEPALA DINAS PERIKANAN</b>	KETERSEDIAAN PANGAN ASAL IKAN	JUMLAH KETERSEDIAAN IKAN (TON)	8.053,57	13.419,15	166,62%
	MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN (TON)	4.506,57	4.318,46	95,83%
<b>Kabid Budidaya Perikanan</b>	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase kenaikan Produksi Ikan Budidaya (TON)	324,00	277,01	85,50%
Kasi Perbenihan	Terlaksananya Perbenihan Ikan	Jumlah Produksi Benih yang Unggul dan berkualitas (ekor)	20.000.000	1.572.120	7,86%
Kasi Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya fasilitasi Sarana produksi dan sarana prasarana budidaya Perikanan	Jumlah kelompok yang di bantu sarana produksi (Kel)	6	6	100,00%
		Jumlah kelompok pengguna Kolam Plastik (Kelompok)	3	3	100,00%
		Luasan Areal Budidaya ikan (m2)	5.000,00	5000	100,00%
Kasi Pakan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Tercukupinya Pakan Ikan	Jumlah Pakan Yang Diproduksi (Kg)	100	70	70,00%
		Jumlah Pakan Yang Masuk (Ton)	486	450	92,59%
	Terlaksananya Pengendalian Hama Dan Penyakit Ikan	Jumlah Kasus Hama Dan Penyakit Perikanan Budidaya Yang Ditangani (kasus)	2	2	100,00%
	Terlaksananya uji sampel kawasan budidaya	Jumlah pemantauan lingkungan budidaya (kali)	12	12	100,00%
<b>Kabid Perikanan Tangkap dan SDI</b>	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase kenaikan Produksi Ikan Tangkap	3.627,29	4.041,45	111,42%
Kasi Pemanfaatan Sumberdaya Ikan	Terlaksananya Kegiatan Perikanan Tangkap	Jumlah penambahan kapal penangkap ikan < 3 GT (buah)	17		0,00%
		Jumlah Alat tangkap (Paket)	19		0,00%
Kasi Pengendalian Sumberdaya Ikan	Terlaksananya sosialisasi UU Perikanan	jlh SosialisasiUU Perikanan	3		0,00%
	Terlaksananya Pemantauan Kawasan Perikanan Tangkap	Jumlah Razia / Patroli Terpadu (Kali)	13		0,00%
		Jumlah Pemantauan, Penangkapan dan penjualan anak ikan (kali)	20		0,00%

		Jumlah Sampel kawasan perikanan dengan data akurat	4		0,00%
Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan	Meningkatkan klasifikasi kelompok Usaha Perikanan	Persentase kelompok Usaha Perikanan yang meningkat klasifikasinya (Kelompok)	8	11	137,50%
Kasi Kemitraan, Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Kemitraan Bidang Perikanan	Jumlah Rekomendasi Yang	2	0	0,00%
		Persentase Kelompok Bermitra Yang Dibina	0	1	0,00%
	Terlaksananya Diklat Usaha Perikanan	Prosentasi Kelompok yang mengikuti DIKLAT Usaha Perikanan	2	2	100,00%
Kasi Kasi Penumbuhkembangan Kelompok	Terlaksananya pembinaan kelompok Usaha Perikanan	Jumlah Kelompok baru (kel)	11	11	100,00%
		Jumlah Kelompok Yang Naik Kelas (kel)	11	11	100,00%
		Jumlah Kelompok Usaha Perikanan administrasinya baik	11	11	100,00%
	Terlaksananya ketersediaan bahan pangan asal ikan	Jumlah ketersediaan bahan pangan asal ikan(ton)	6.700	5.326	79,49%
	Terlaksananya pemeriksaan bahan pangan asal ikan	Jumlah Sampel yang periksa (sample)	10	5	50,00%
	terlaksananya promosi usahahasil perikanan	jumlah promosi yang dilaksanakan (kali)	4	4	100,00%

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN TAPIN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah :

Nama : **H. Parianata, S.AP, MM**

Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tapin

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H.M. Arifin Arpan, MM**

Jabatan : Bupati Tapin

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

  
Pihak Kedua  
  
**Drs. H.M. Arifin Arpan, MM**

Rantau,  
Pihak pertama  
  
  
**H. Parianata, S.AP, MM**

**PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran

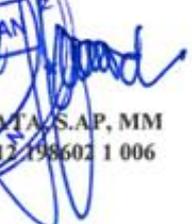
: Dinas Perikanan Kabupaten Tapin  
: 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	KETERSEDIAAN PANGAN ASAL IKAN	JUMLAH KETERSEDIAAN IKAN (TON)	8.573,91
2	MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN (TON)	4.652,91

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	525,327,400.00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	126,368,400.00
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp	42,700,000.00
4. Program pengembangan budidaya perikanan	Rp	321,750,000.00
5. Program pengembangan perikanan tangkap	Rp	366,834,000.00
6. Program optimalisasi pengelolaan produksi perikanan	Rp	1,682,546,000.00
<b>JUMLAH</b>	Rp	<b>3,065,525,800.00</b>

Rantau,

Bupati Tapin,  
  
Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tapin  
  
H. PARIANATA, S.AP, MM  
NIP. 19660512 198602 1 006





3.01 . 3.01.01.01 . 15.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	8,175,000.00	7,125,000.00	87.16	1,050,000.00
3.01 . 3.01.01.01 . 16	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	24,750,000.00	3,462,500.00	13.99	21,287,500.00
3.01 . 3.01.01.01 . 16.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	24,750,000.00	3,462,500.00	13.99	21,287,500.00
3.01 . 3.01.01.01 . 22	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	12,500,000.00	12,500,000.00	100.00	0.00
3.01 . 3.01.01.01 . 22.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	12,500,000.00	12,500,000.00	100.00	0.00
3.01 . 3.01.01.01 . 24	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	1,138,976,700.00	584,967,930.00	51.36	554,008,770.00
3.01 . 3.01.01.01 . 24.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	853,528,000.00	309,810,900.00	36.30	543,717,100.00
3.01 . 3.01.01.01 . 24.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	266,948,700.00	259,277,030.00	97.13	7,671,670.00
3.01 . 3.01.01.01 . 24.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	18,500,000.00	15,880,000.00	85.84	2,620,000.00
3.01 . 3.01.01.01 . 25	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air</b>	117,410,000.00	114,275,400.00	97.33	3,134,600.00
3.01 . 3.01.01.01 . 25.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	117,410,000.00	114,275,400.00	97.33	3,134,600.00
3.01 . 3.01.01.01 . 26	<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	36,500,000.00	36,000,000.00	98.63	500,000.00
3.01 . 3.01.01.01 . 26.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	36,500,000.00	36,000,000.00	98.63	500,000.00
3.01 . 3.01.01.01 . 27	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	10,500,000.00	8,450,000.00	80.48	2,050,000.00
3.01 . 3.01.01.01 . 27.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	10,500,000.00	8,450,000.00	80.48	2,050,000.00
3.01 . 3.01.01.01 . 28	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	110,504,600.00	103,389,600.00	93.56	7,115,000.00
3.01 . 3.01.01.01 . 28.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	103,048,100.00	99,983,100.00	97.03	3,065,000.00
3.01 . 3.01.01.01 . 28.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7,456,500.00	3,406,500.00	45.68	4,050,000.00
	<b>JUMLAH</b>	2,504,860,200.00	1,852,218,834.00	73.94	652,641,366.00

RANTAU, 1 Januari 2021

**Kepala SKPD**

**H. PARIANATA, S.AP, MM**

NIP. 19660512 198602 1 006

KODE	KEGIATAN	ANGGARAN	TOTAL
3.01 . 3.01.01.01 . 01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	42,484,500.00	42,413,100.00
3.01 . 3.01.01.01 . 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42,484,500.00	42,413,100.00
3.01 . 3.01.01.01 . 02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	41,500,000.00	41,482,300.00
3.01 . 3.01.01.01 . 02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22,600,000.00	22,582,300.00
3.01 . 3.01.01.01 . 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18,900,000.00	18,900,000.00
3.01 . 3.01.01.01 . 06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	480,349,100.00	513,612,000.00
3.01 . 3.01.01.01 . 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,024,000.00	3,024,000.00
3.01 . 3.01.01.01 . 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42,842,000.00	42,484,800.00
3.01 . 3.01.01.01 . 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71,737,100.00	57,802,200.00
3.01 . 3.01.01.01 . 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,800,000.00	2,535,000.00
3.01 . 3.01.01.01 . 06.07	Penyediaan Bahan/Material	3,250,000.00	0.00
3.01 . 3.01.01.01 . 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2,400,000.00	1,605,000.00
3.01 . 3.01.01.01 . 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	352,296,000.00	406,161,000.00
3.01 . 3.01.01.01 . 07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	172,272,900.00	169,414,000.00
3.01 . 3.01.01.01 . 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98,691,200.00	96,120,000.00
3.01 . 3.01.01.01 . 07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	73,581,700.00	73,294,000.00
3.01 . 3.01.01.01 . 08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	132,938,400.00	98,730,701.00
3.01 . 3.01.01.01 . 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84,638,400.00	64,830,701.00
3.01 . 3.01.01.01 . 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48,300,000.00	33,900,000.00
3.01 . 3.01.01.01 . 09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	166,660,000.00	107,396,303.00
3.01 . 3.01.01.01 . 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	115,212,000.00	92,936,303.00
3.01 . 3.01.01.01 . 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,040,000.00	14,460,000.00
3.01 . 3.01.01.01 . 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36,408,000.00	0.00
3.01 . 3.01.01.01 . 15	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	17,514,000.00	16,125,000.00
3.01 . 3.01.01.01 . 15.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	9,339,000.00	9,000,000.00
3.01 . 3.01.01.01 . 15.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	8,175,000.00	7,125,000.00
3.01 . 3.01.01.01 . 16	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	24,750,000.00	3,462,500.00
3.01 . 3.01.01.01 . 16.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	24,750,000.00	3,462,500.00
3.01 . 3.01.01.01 . 22	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	12,500,000.00	12,500,000.00
3.01 . 3.01.01.01 . 22.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	12,500,000.00	12,500,000.00
3.01 . 3.01.01.01 . 24	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	1,138,976,700.00	584,967,930.00
3.01 . 3.01.01.01 . 24.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	853,528,000.00	309,810,900.00
3.01 . 3.01.01.01 . 24.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	266,948,700.00	259,277,030.00
3.01 . 3.01.01.01 . 24.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	18,500,000.00	15,880,000.00
3.01 . 3.01.01.01 . 25	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air</b>	117,410,000.00	114,275,400.00
3.01 . 3.01.01.01 . 25.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	117,410,000.00	114,275,400.00

	rkawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusanakan dalam Kabupaten/Kota		
3.01 . 3.01.01.01 . 26	<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	36,500,000.00	36,000,000.00
3.01 . 3.01.01.01 . 26.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	36,500,000.00	36,000,000.00
3.01 . 3.01.01.01 . 27	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	10,500,000.00	8,450,000.00
3.01 . 3.01.01.01 . 27.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	10,500,000.00	8,450,000.00
3.01 . 3.01.01.01 . 28	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	110,504,600.00	103,389,600.00
3.01 . 3.01.01.01 . 28.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	103,048,100.00	99,983,100.00
3.01 . 3.01.01.01 . 28.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7,456,500.00	3,406,500.00
<b>JUMLAH</b>		2,504,860,200.00	1,852,218,834.00

%
99.83
99.83
99.96
99.92
100.00
106.92
100.00
99.17
80.58
52.81
0.00
66.88
115.29
98.34
97.39
99.61
74.27
76.60
70.19
64.44
80.67
96.14
0.00
92.07
96.37
87.16
13.99
13.99
100.00
100.00
51.36
36.30
97.13
85.84
97.33
97.33

98.63
98.63
80.48
80.48
93.56
97.03
45.68
73.94

# DINAS PERIKANAN KABUPATEN TAPIN

**KEPALA DINAS PERIKANAN**

**TERSEDIAANYA PANGAN ASAL IKAN**

**INDIKATOR :**  
**1. JUMLAH KETERSEDIAAN IKAN DIPASAR (TON)**  
**2. JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN (TON)**

ESS.II

**BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA**

**Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya**

**INDIKATOR:**  
**Persentase Peningkatan Produksi Ikan Budidaya**

**KASI PERBENIHAN**

Terlaksananya Perbenihan Ikan

**INDIKATOR:**

1. Prosentasi Pembudidaya ikan yang mendapatkan bantuan induk ikan
2. Jumlah Hasil Produksi Benih yang berkualitas

**KASI PEMBUDIDAYAAN**

Terlaksananya fasilitasi Sarana produksi dan sarana prasarana budidaya Perikanan

**INDIKATOR:**

1. Jumlah kelompok yang di bantu sarana produksi
2. Jumlah Pengguna kelompok Kolam Plastik
3. Luasan Areal Budidaya ikan

**KASI PAKAN, KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN**

1. Tercukupinya Pakan Ikan

2. Terlaksananya Pengendalian Hama Dan Penyakit Ikan
3. Terlaksananya uji sampel kawasan budidaya

**INDIKATOR:**

1. Jumlah Pakan Yang Diproduksi
2. Jumlah Pakan Yang Masuk
3. Jumlah Kasus Hama Dan Penyakit Perikanan Budidaya Yang Ditangani
4. Jumlah pemantauan lingkungan budidaya

**BIDANG PERIKANAN TANGKAP DAN SDA**

**Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap**

**INDIKATOR:**  
**Persentase Peningkatan Produksi Ikan Tangkap**

**KASI PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN**

Terlaksananya Fasilitasi Sarana Penangkapan Ikan

**INDIKATOR:**

1. Jumlah penambahan kapal penangkap ikan < 3 GT
2. Jumlah Alat tangkap Ikan (Paket)

**KASI PENGENDALIAN SUMBER DAYA IKAN**

1. Terlaksananya sosialisasi UU Perikanan

2. Terlaksananya Pemantauan Kawasan Perikanan Tangkap

**INDIKATOR:**

1. Jumlah sosialisasi UU Perikanan
2. Jumlah Razia terpadu
3. Jumlah Pemantauan Penjualan anak Ikan
4. Jumlah Sample kawasan perikanan dengan data akurat

**BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA PERIKANAN**

**Meningkatnya Klasifikasi Kelompok Usaha Perikanan**

**INDIKATOR:**  
**Persentase kelompok Usaha Perikanan yang meningkat klasifikasinya**

**SEKSI KEMITRAAN / PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

1. Terlaksananya Kemitraan Bidang Perikanan

2. Terlaksananya Diklat Usaha Perikanan

**INDIKATOR:**

1. Jumlah Rekomendasi Yang Dikeluarkan
2. Prosentasi Kelompok Bermitra Yang Dibina
3. Prosentasi Kelompok yang mengikuti DIKLAT Usaha Perikanan

**SEKSI PENUMBUHKEMBANGAN KELOMPOK**

1. Terlaksananya pembinaan kelompok Usaha Perikanan

3. Terlaksananya ketersediaan bahan pangan asal ikan

4. Terlaksananya pemeriksaan bahan pangan asal ikan

**INDIKATOR:**

1. Jumlah Kelompok baru
2. Jumlah Kelompok Yang Naik Kelas
3. Jumlah Kelompok Usaha Perikanan administrasi baik
4. Jumlah bahan pangan asal ikan
5. Jumlah Sampel yang diperiksa

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan  
2. Pelayanan sarana prasarana dan administrasi perkantoran  
3. Peningkatan kualitas sdm sopd  
4. Pelayanan administrasi keuangan  
**INDIKATOR:**  
1. Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan pada LKIP SOPD  
2. Persentase kenaikan nilai komponen perencanaan pada LKIP SOPD  
3. Persentase aset yang tercatat  
4. Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian PNS SOPD  
5. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SOPD  
6. Persentase penyerapan anggaran SOPD

ESS.III

1. Menyusun Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja SOPD

2. Menyusun Perencanaan Dan Pelaporan Administrasi Keuangan SOPD

**INDIKATOR:**

1. Nilai komponen Pelaporan pada LKIP SOPD
2. Nilai komponen Perencanaan pada LKIP SOPD
3. Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Yang Dibuat
4. Jumlah Dokumen Keuangan Yang dibuat

1. Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran

2. Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian SOPD

**INDIKATOR:**

1. Jumlah Aset yang tercatat
2. Jumlah Dokumentasi Pelayanan Surat Menyurat
3. Jumlah Dokumen Sarana Dan Prasarana
3. Jumlah Pegawai Yang Administrasi Kepegawaiannya Dilayani Secara Tertib.

ESS.IV

Blogger.com - Create a uni... x DINAS PERIKANAN KABUP... x

dinasperikanankabtapi.blogspot.co.id

Most Visited Getting Started Suggested Sites Web Slice Gallery

# PK DiNAS PERIKANAN

Juli 11, 2017

PK DiNAS PERIKANAN 2017 klik [disini](#)

Posting Komentar

# POHON KINERJA 2017

Juli 10, 2017

It looks like you haven't started Firefox in a while. Do you want to clean it up for



Blogger.com - Create a uni... x DINAS PERIKANAN KABUP... x

dinasperikanankabtapi.blogspot.co.id

Most Visited Getting Started Suggested Sites Web Slice Gallery

≡ *DINAS PERIKANAN KABUPATEN*

# RENSTRA

Juli 10, 2017

RENSTRA Dinas Perikanan 2017 klik [disini](#)

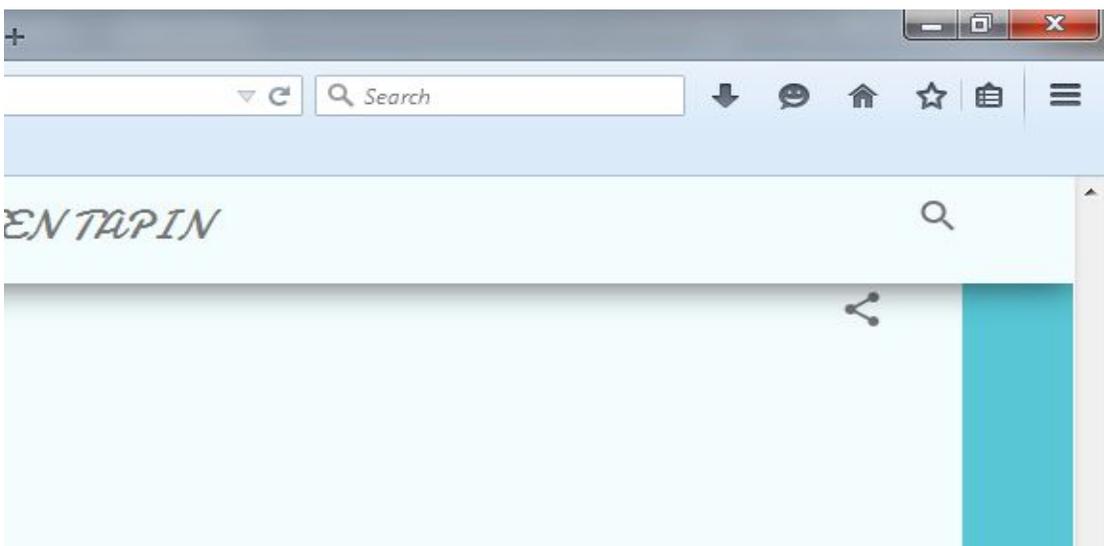
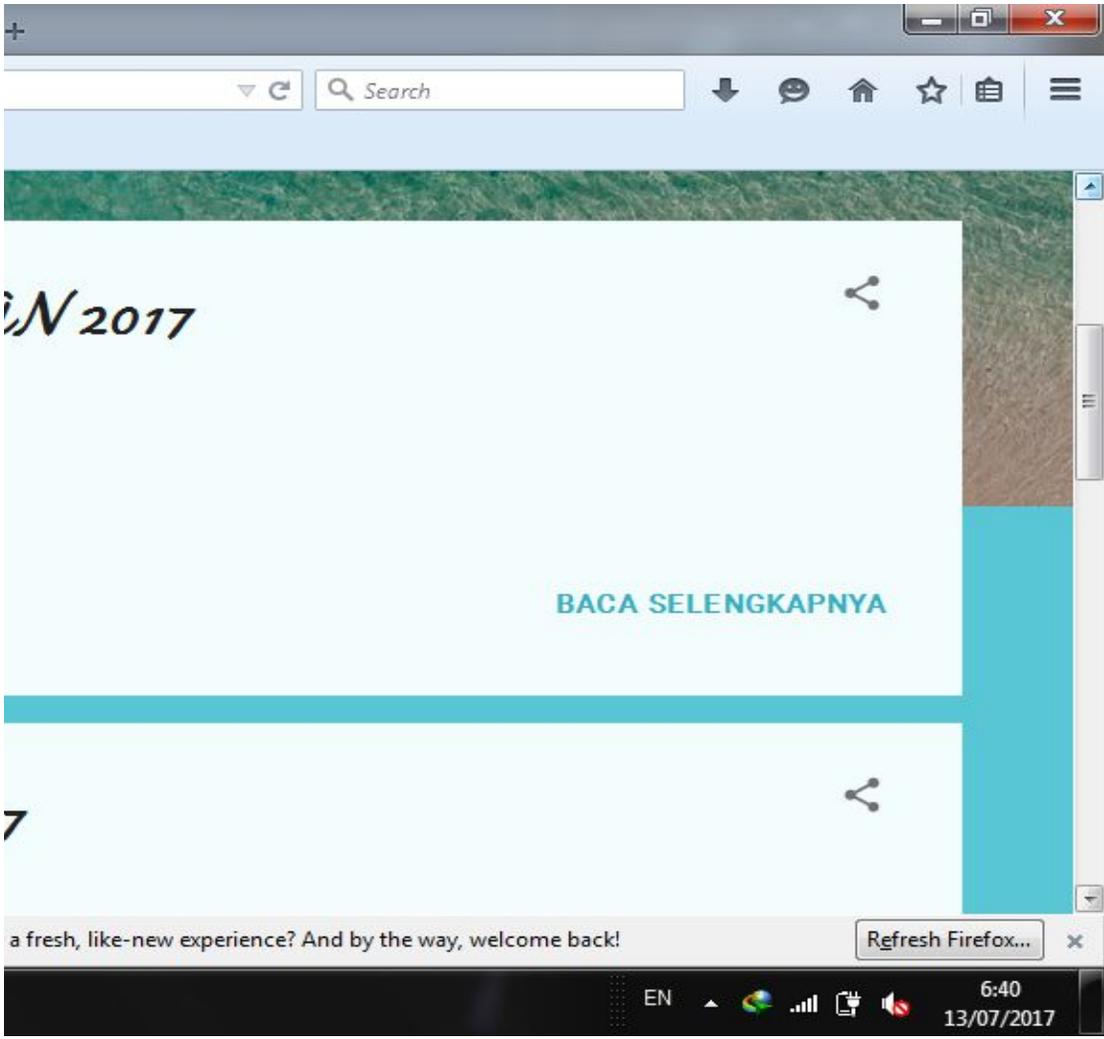
Posting Komentar

## *nenja 2017*

Juli 10, 2017

It looks like you haven't started Firefox in a while. Do you want to clean it up for





BACA SELENGKAPNYA



a fresh, like-new experience? And by the way, welcome back!

Refresh Firefox...



EN



6:41  
13/07/2017



